

ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Lilis Agnes Pasaribu¹, Yan Christin Br Sembiring², Poltak Teodorus Parhusip³,
Lantiur Lidia Gultom⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas

Email : lilisagnes30@gmail.com¹, yanchristin11@gmail.com², ikoparhusip17@gmail.com³,
lantiurlidiagultom@gmail.com⁴

ABSTRACT

This study aims to determine the financial performance of the Humbang Hasundutan Regency Government in 2019-2023 using regional financial ratios, namely independence, effectiveness, efficiency, harmony/activity, and growth. The population is all Regional Government Financial Reports of Humbang Hasundutan Regency. The sample of this study is the LRA of Humbang Hasundutan Regency in 2019-2023. The data analysis technique is using quantitative descriptive. The results of the study show the financial performance of the Humbang Hasundutan Regency Government based on Instructive where the role of the Central Government is more dominant than the Regional Government which is unable to implement regional autonomy so that dependence on central/provincial transfers, effectiveness with regional financial capabilities is Effective, efficiency is classified as Fairly Efficient, the harmony ratio is still dominated by operating expenses rather than development expenses and the growth ratio is classified as Very Low. Overall financial performance is classified as Very Poor where the Government has not been able to fully realize PAD, Effectiveness is quite good and stable, the Government is slow to absorb the budget, the allocation of routine expenditure is high, and development expenditure is low. Revenue growth is low and expenditure growth has increased every year.

Keywords: Independence, Effectiveness, Efficiency, Harmony, Growth

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2019-2023 dengan menggunakan rasio-rasio keuangan daerah yaitu kemandirian, efektivitas, efisiensi, keselarasan/aktivitas, dan pertumbuhan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Sampel penelitian ini adalah LRA Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2019-2023. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Instruktif dimana peran Pemerintah Pusat lebih dominan dibandingkan Pemerintah Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah sehingga ketergantungan terhadap transfer pusat/provinsi, efektivitas dengan kemampuan keuangan daerah tergolong Efektif, efisiensi tergolong Cukup Efisien, rasio keselarasan masih didominasi oleh beban operasional daripada beban pembangunan dan rasio pertumbuhan tergolong Sangat Rendah. Kinerja keuangan secara keseluruhan tergolong Sangat Buruk di mana Pemerintah belum mampu merealisasikan PAD secara penuh, Efektivitas cukup baik dan stabil, Pemerintah lambat dalam menyerap anggaran, alokasi belanja rutin tinggi, dan belanja pembangunan rendah. Pertumbuhan pendapatan rendah dan pertumbuhan belanja meningkat setiap tahun.

Kata Kunci: kemandirian, efektivitas, efisiensi, keserasian, pertumbuhan

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah selama proses pelaksanaannya. Pengelolaan anggaran daerah dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap tahunnya yang menjadi instrumen utama dalam perencanaan dan pengalokasian sumber daya keuangan. Melalui APBD pemerintah daerah mengatur penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai berbagai program pembangunan dan kegiatan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. APBD kabupaten yang disusun dengan baik akan menciptakan dasar yang kuat untuk pengalokasian dana ke desa melalui Dana Desa atau bantuan lainnya, sementara pengelolaan dana desa melalui APBDes yang sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun

2018 akan memastikan bahwa dana yang diterima desa digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa.

Pelaksanaan APBD akan dievaluasi setiap tahunnya melalui pelaporan keuangan daerah untuk melihat dan mengukur kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan dan menggunakan APBD tersebut. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Arini & Zulvianira, 2024:68). Pemerintah daerah berkewajiban melaporkan keuangan daerah yang dikelolanya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan kemudian disampaikan kepada DPRD untuk diperiksa dan dievaluasi. LKPD merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan anggaran dan belanja yang telah disusun dalam APBD dan merupakan salah satu alat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. LKPD memiliki sejumlah informasi keuangan yang dapat dianalisis untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah. Salah satu komponen LKPD adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dapat dilakukan analisis lebih lanjut.

Dalam akuntansi sektor publik, laporan keuangan sebagai alat ukur kinerja keuangan pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Setiap Pemerintah Daerah wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam penyelenggaraan keuangan daerah serta dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan keuangan daerah. Laporan keuangan adalah media informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan atau instansi yang mencakup informasi mengenai seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kinerja yang baik didefinisikan sebagai hasil yang melebihi harapan. Sedangkan kinerja keuangan ialah ukuran kinerja yang dilakukan dengan memanfaatkan suatu indikator, khususnya indikator keuangan. Analisis rasio keuangan daerah merupakan salah satu metode yang dapat difungsikan guna mengevaluasi kinerja kinerja keuangan pemerintah daerah (Halim, 2008).

Menurut PP Nomor 71 yaitu LRA adalah laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah untuk menggambarkan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam suatu periode tertentu yang telah disetujui oleh lembaga legislatif (DPRD) dalam suatu periode anggaran (biasanya satu tahun anggaran). LRA adalah salah satu komponen penting dalam laporan keuangan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sejauh mana anggaran yang telah disusun dapat diimplementasikan dan apakah realisasi anggaran tersebut telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Anggaran daerah bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk memetakan sumber daya dan kebutuhan, tetapi juga sebagai acuan untuk menilai sejauh mana pemerintahan daerah dapat mengelola sumber daya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Salah satu instrumen utama dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut adalah anggaran daerah yang merupakan rencana keuangan tahunan untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arini & Loekman (2024) judul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek” merupakan replikasi jurnal yang digunakan oleh peneliti yang telah menunjukkan bahwa analisis laporan realisasi anggaran merupakan alat ukur yang efektif untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan rasio kemandirian menunjukkan kemampuan keuangan yang rendah dengan pola instruktif yaitu ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sangat besar dan daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah dalam hal keuangan, berdasarkan rasio efektivitas menunjukkan cukup efektif sedangkan dengan rasio efisiensi menunjukkan sangat efisien dan berdasarkan rasio keserasian terhadap belanja operasi menggambarkan bahwa belanja daerah didominasi oleh belanja rutin, serta dalam rasio keserasian terhadap belanja modal menunjukkan bahwa dalam melaksanakan belanja pengembangan sarana prasarana masih belum optimal.

TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORITIS

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari akuntansi sektor publik karena keduanya berkaitan dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh entitas pemerintah atau lembaga publik lainnya. Sebagai bagian dari sektor publik, akuntansi pemerintahan memiliki fokus utama pada pertanggungjawaban penggunaan dana publik dan memastikan transparansi dalam pengelolaan sumber daya negara. Tujuan utama dari akuntansi pemerintahan adalah menyediakan informasi yang akurat dan relevan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan pemerintah untuk kepentingan pengambilan keputusan, baik oleh pihak internal pemerintah seperti manajer anggaran dan pembuat kebijakan, maupun pihak eksternal seperti legislatif, lembaga pengawas, dan masyarakat umum. Akuntansi Pemerintahan dapat di definisikan menjadi suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut (Trismiko, D. 2016).

Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 1, keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban daerah yang mampu dinilai dengan uang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya semua bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka APBD. Tujuan utama dari pengelolaan keuangan daerah ialah meningkatnya pemberian layanan bagi masyarakat. APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesenjangan masyarakat di daerah. Tugas utama dari anggaran adalah mengendalikan aktivitas fiskal pemerintah. Struktur APBD adalah pendapatan daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus selalu menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Adapun prinsip transparansi yang merupakan wujud adanya keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Menurut Ihyaul Ulum (2024) Kinerja adalah gambaran mengenai pencapaian, prestasi atau unjuk kerja dari instansi pemerintah. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Indikator yang digunakan adalah rasio keuangan daerah yaitu:

1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat. dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD. Secara sederhana rasio kemandirian dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat / Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

Secara umum, kriteria kemampuan keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

| Kemampuan Keuangan | Kemandirian (%) | Pola Hubungan |
|--------------------|-----------------|---------------|
| Rendah sekali | 0 - 25 | Instruktif |
| Rendah | >25 - 50 | Konsultatif |
| Sedang | >50 - 75 | Partisipatif |
| Tinggi | >75 - 100 | Delegatif |

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Berdasarkan tabel 1 diatas pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pola hubungan instruktif, ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sangat besar dan daerah dapat dikatakan tidak mampu melaksanakan otonomi daerah dalam hal keuangan.
- b. Pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat terhadap daerah perlahan berkurang. Pemerintah daerah dianggap sedikit lebih mampu untuk menjalankan otonomi daerah, sehingga pemerintah pusat berperan dalam hal konsultasi.
- c. Pola hubungan partisipatif, peran konsultasi beralih pada peran partisipasi pemerintah pusat, karena suatu daerah sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah dan peran pemerintah pusat terhadap daerah semakin berkurang.
- d. Pola hubungan delegatif, pemerintah pusat tidak lagi ikut campur tangan dalam pemerintahan daerah karena daerah sudah benar-benar mampu melaksanakan otonomi daerah secara mandiri dan sudah mendapat keyakinan penuh dalam pelaksanaan otonomi keuangan.

2. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. (Naffa Litauji Milla, 2021). Rasio efektivitas diukur dengan :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Secara umum, untuk menilai rasio efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2 Tingkat Kemampuan Efektivitas Keuangan Daerah

| Kemampuan Keuangan Daerah | Efektivitas (%) |
|---------------------------|-----------------|
| Sangat Efektif | >100 |
| Efektif | >90-100 |
| Cukup Efektif | >80 - 90 |
| Kurang Efektif | >60 - 80 |
| Tidak Efektif | 0 - 60 |

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

3. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi digunakan untuk menilai pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus rasio efisiensi adalah

$$\text{Rasio Efisiensi} : \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Secara umum, untuk menilai rasio efisiensi dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah

| Kriteria Efisiensi | Efisiensi (%) |
|--------------------|---------------|
| Tidak Efisien | >100 |
| Kurang Efisien | >90 - 100 |
| Cukup Efisien | >80 - 90 |



| Kriteria Efisiensi | Efisiensi (%) |
|--------------------|---------------|
| Efisien | >60 - 80 |
| Sangat Efisien | < 60 |

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

4. Rasio Kesorasian/Aktivitas

Rasio Kesorasian/Aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Ada dua perhitungan dalam Rasio Kesorasian ini yaitu :

a. Rasio Belanja Operasi

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini memberikan gambaran kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja operasi.. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90% (Mahmudi (2010)). Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah antara 5-20% (Mahmudi, 2010). Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2010).. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Keterangan r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah atau Belanja Daerah yang dihitung pada tahun tahun berjalan

P_o = Total Pendapatan Daerah atau Belanja Daerah yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum)

Tabel 4 Kriteria Pertumbuhan Keuangan Daerah

| Kriteria Pertumbuhan | Persentase (%) |
|----------------------|----------------|
| Sangat Rendah | 0 -10 |
| Rendah | >11 - 20 |
| Sedang | >21 - 30 |
| Tinggi | >40 |

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung Sugiyono (2019). Lokasi penelitian adalah Kabupaten Humbang Hasundutan di Jl. Mayor Saur H. Puba Kompleks Perkantoran Bukit Inspirasi-Dolok sanggul, Sumatera Utara 22457.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2019:126) populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2003 sampai saat ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi dan kepustakaan. Dokumentasi yaitu berupa data yang diperoleh dalam bentuk jadi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Teknik ini dilaksanakan dengan membuat copy atau pencatatan dari arsip resmi atau asli Pemerintah Kabupaten (<https://humbanghasundutankab.go.id>). Dokumen yang diperlukan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan tahapan berikut ini:

- a. Mengumpulkan data penelitian yaitu Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
- b. Menghitung rasio keuangan daerah dalam laporan keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan Rasio yang digunakan ada 5 yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi, rasio keserasian/aktivitas dan rasio pertumbuhan.
- c. Menganalisis dan menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.
- d. Membuat kesimpulan dan saran

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Rasio Kemandirian

Tabel 5 Rasio Kemandirian

| Tahun | Realisasi PAD | Pendapatan Transfer | Kemandirian | Pola Hubungan |
|------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------|
| 2019 | Rp 73.757.931.630 | Rp 768.373.327.819 | 9,6% | Instruktif |
| 2020 | Rp 67.936.178.389 | Rp 694.988.850.038 | 9,8% | Instruktif |
| 2021 | Rp 78.250.589.734 | Rp 897.804.592.724 | 8,7% | Instruktif |
| 2022 | Rp 72.638.585.999 | Rp 851.132.320.187 | 8,5% | Instruktif |
| 2023 | Rp 77.189.258.590 | Rp 910.420.419.251 | 8,5% | Instruktif |
| Rata -rata | | | 9,0% | Instruktif |

Sumber: BPKPD Humbang Hasundutan (diolah)

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa rasio kemandirian Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2019-2023 secara berturut-turut berada dalam Pola Hubungan Instruktif. Sesuai dengan rumus rasio kemandirian pinjaman selama lima tahun terakhir adalah nol. Hasil dari penelitian bahwa Rasio Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa masih tingginya bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi terhadap Kabupaten Humbang Hasundutan. Kemampuan kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berada pada Pola hubungan Instruktif yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah dimana daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah dimana Kabupaten Humbang Hasundutan berdiri pada tahun 2003 yang merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Tapanuli Utara. Hal inilah yang menunjukkan masih rendahnya kemandirian Kabupaten Humbang Hasundutan dan tingginya ketergantungan terhadap bantuan ekstern pemerintah

pusat/provinsi dimana belum maksimalnya PAD yang diterima dan juga terdapat beberapa sumber pendapatan yang pengelolaannya belum dilaksanakan secara maksimal.

Naik atau turunnya pertumbuhan PAD sangat dipengaruhi oleh jumlah dan jenis pajak, retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah dan kurang insentifnya aparat pengelolaan dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Jika jumlah PAD dan retribusi daerah dipungut semakin banyak, maka akibatnya PAD akan semakin tinggi. Walaupun dalam prakteknya peningkatan PAD tidak hanya dari pajak dan retribusi daerah saja. Namun penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi pajak daerah menjadi indikator utama dalam peningkatan PAD. Upaya dalam meningkatkan PAD bukan merupakan suatu hal yang mudah karena banyak kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, misalnya tingkat perkembangan ekonomi daerah, jumlah penduduk dan pendapatan per kapita sangat berperan dalam peningkatan PAD di Kabupaten Humbang Hasundutan. Besarnya dana dari pemerintah pusat menyebabkan rendahnya persentase kemandirian keuangan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

2. Rasio Efektivitas

Tabel 6 Rasio Efektivitas

| Tahun | Realisasi PAD | Anggaran PAD | Efektivitas | Kemampuan Keuangan Daerah |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| 2019 | Rp 73.757.931.630 | Rp 66.211.385.334 | 111,4% | Sangat Efektif |
| 2020 | Rp 67.936.178.388 | Rp 70.130.037.834 | 96,9% | Efektif |
| 2021 | Rp 78.250.589.733 | Rp 75.226.768.375 | 104,0% | Sangat Efektif |
| 2022 | Rp 72.638.585.999 | Rp 72.960.984.118 | 99,6% | Efektif |
| 2023 | Rp 77.189.258.589 | Rp 87.048.360.602 | 88,7% | Cukup Efektif |
| Rata - rata | | | 100% | Efektif |

Sumber: BPKPD Humbang Hasundutan (diolah)

Berdasarkan tabel 6 Realisasi PAD dan Anggaran PAD mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 realisasi pendapatan Rp 73.757.931.630 yang melebihi anggaran pendapatan Rp 66.211.385.334 dengan persentase 111,4%, tahun 2020 realisasi pendapatan mengalami penurunan Rp 67.936.178.388 dengan anggaran pendapatan yang meningkat dari tahun sebelumnya Rp 70.130.037.834 dengan persentase 96,9%, tahun 2021 realisasi pendapatan mengalami peningkatan Rp 78.250.589.733 dengan anggaran pendapatan yang meningkat Rp 75.226.768.375 dengan persentase 104%, pada tahun 2022 mengalami peningkatan Rp 72.638.585.999 dengan anggaran pendapatan menurun dari tahun sebelumnya Rp 72.960.984.118 dengan persentase 99,6%, dan tahun 2023 realisasi pendapatan mengalami peningkatan Rp 77.189.258.589 dengan anggaran pendapatan meningkat Rp 87.048.360.602 dengan persentase 88,7%. Maka rata rata persentase dari 5 tahun terakhir adalah 100%.

Hasil dari penelitian bahwa rasio efektivitas Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa Efektivitas Kemampuan Keuangan Daerah adalah Efektif dimana Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan belum bisa melebihi anggaran atau sesuai anggaran. Maka kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan berada pada tingkat yang standar atau sesuai dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah yang menunjukkan kinerja keuangan sudah baik dan stabil.

3. Rasio Efisiensi

Tabel 7 Rasio Efisiensi

| Tahun | Realisasi Belanja Daerah | Realisasi Pendapatan Daerah | Efisiensi | Kriteria Efisiensi |
|-------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|
| 2019 | Rp 811.690.125.779 | Rp 1.008.114.675.739 | 80,5% | Cukup Efisien |
| 2020 | Rp 765.374.439.783 | Rp 939.495.651.454 | 81,5% | Cukup Efisien |
| 2021 | Rp 799.555.477.225 | Rp 980.263.296.077 | 81,6% | Cukup Efisien |
| 2022 | Rp 834.298.860.910 | Rp 942.550.853.382 | 88,5% | Cukup Efisien |
| 2023 | Rp 1.045.288.109.320 | Rp 1.009.951.652.096 | 103,5% | Tidak Efisien |
| Rata - rata | | | 87% | Cukup Efisien |

Sumber: BPKPD Humbang Hasundutan (diolah)

Berdasarkan tabel 7 diatas Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi Pendapatan Daerah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 realisasi belanja daerah Rp 811.690.125.779 dan realisasi pendapatan daerah Rp 1.008.114.675.739 dengan persentase 80,5%, tahun 2020 realisasi belanja daerah mengalami penurunan Rp 765.374.439.783 dan realisasi pendapatan daerah Rp 939.495.651.454 dengan persentase 81,5%, tahun 2021 realisasi belanja daerah mengalami peningkatan Rp 799.555.477.225 dan realisasi pendapatan daerah mengalami peningkatan Rp 980.263.296.077 dengan persentase 81,6%, tahun 2022 realisasi belanja daerah mengalami peningkatan Rp 834.298.860.910 dan realisasi pendapatan daerah mengalami penurunan lagi Rp 942.550.853.382 dengan persentase 88,5% dan pada tahun 2023 realisasi belanja daerah paling tinggi yaitu Rp 1.045.288.109.320 dengan realisasi pendapatan daerah Rp 1.009.951.652.096 dengan persentase 103,5%. Maka rata rata persentase dari 5 tahun terakhir adalah 87%. Hasil dari penelitian bahwa rata-rata dari Rasio Efisiensi Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2019-2023 menunjukkan Cukup Efisien artinya belanja tidak melebihi pendapatan. Walaupun belum optimalnya serapan anggaran dalam Belanja Daerah sesuai lampiran LRA pada tahun 2020 dan 2021 pada belanja modal gedung dan bangunan disebabkan karena banyaknya penundaan pelaksanaan program/kegiatan .

4. Rasio Keserasian/Aktivitas

a. Rasio Keserasian/Aktivitas Belanja Operasi

Tabel 8 Rasio Keserasian/Aktivitas Belanja Operasi

| Tahun | Total Belanja Operasi | Realisasi Belanja Daerah | Rasio Aktivitas |
|------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| 2019 | Rp 630.710.516.700 | Rp 811.690.125.779 | 77,7% |
| 2020 | Rp 623.099.685.628 | Rp 765.374.439.783 | 81,4% |
| 2021 | Rp 658.934.470.481 | Rp 799.555.477.225 | 82,4% |
| 2022 | Rp 647.724.734.126 | Rp 834.298.860.910 | 77,6% |
| 2023 | Rp 666.196.662.043 | Rp 1.045.288.109.320 | 63,7% |
| Rata- rata | | | 76,6% |

Sumber: BPKPD Humbang Hasundutan (diolah)

Berdasarkan tabel 8 diatas Belanja Operasi dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten humbang Hasundutan tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Hasil dari penelitian bahwa rata-rata persentase dari Rasio Belanja Operasi Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2019-2023 yaitu 76,6%. Menurut pendapat dari Mahmudi (2010) masih ideal karena berada dalam rentang 60-90% artinya 3/4 dari total anggaran daerah didominasi untuk belanja operasi karena merupakan kegiatan yang fundamental untuk menjalankan pemerintahan dan memberikan layanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya alokasi Belanja Operasi Kabupaten Humbang Hasundutan seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial daripada Belanja Modal

b. Rasio Keserasian/Aktivitas Belanja Modal

Tabel 9 Rasio Keserasian/Aktivitas Belanja Modal

| Tahun | Total Belanja Modal | Realisasi Belanja Daerah | Rasio Aktivitas |
|-------------|---------------------|--------------------------|-----------------|
| 2019 | Rp 177.278.522.408 | Rp 811.690.125.779 | 21,8% |
| 2020 | Rp 118.464.935.599 | Rp 765.374.439.783 | 15,5% |
| 2021 | Rp 140.385.344.274 | Rp 799.555.477.225 | 17,6% |
| 2022 | Rp 179.906.324.938 | Rp 834.298.860.910 | 21,6% |
| 2023 | Rp 200.573.727.619 | Rp 1.045.288.109.320 | 19,2% |
| Rata - rata | | | 19,1% |

Sumber: BPKPD Humbang Hasundutan (diolah)

Berdasarkan 9 di atas Belanja Modal dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten humbang Hasundutan tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 untuk Belanja Operasi yang digunakan adalah Rp 177.278.522.408 dari Belanja Daerah Rp 811.690.125.779 dengan persentase 21,8%, tahun 2020 Belanja Modal mengalami penurunan Rp 118.464.935.599 dari total belanja daerah yang juga menurun Rp 765.374.439.783 dengan persentase 15,5%, tahun 2021 Belanja Modal mengalami kenaikan Rp 140.385.344.274 dari total belanja daerah yang meningkat Rp 799.555.477.225 dengan persentase 17,6%, tahun 2022 Belanja Modal mengalami peningkatan Rp 179.906.324.938 dari total belanja daerah yang mengalami peningkatan Rp 834.298.860.910 dengan persentase 21,6% dan tahun 2023 Belanja Operasi mengalami peningkatan Rp 200.573.727.619 dari total belanja daerah yang mengalami peningkatan Rp1.045.288.109.320 dengan persentase 19,2%. Maka rata-rata persentase dari lima tahun berturut-turut adalah 19,1%.

Hasil dari penelitian bahwa rata-rata dari Rasio Belanja Modal Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2019-2023 yaitu 19,1%. Menurut pendapat dari Mahmudi (2010) menunjukkan belum ideal karena berada dalam rentang 5-20% yang menunjukkan hanya 1/5 dari total anggaran daerah didominasi untuk belanja modal. Dalam hal ini kurangnya investasi tanah, infrastruktur pada pembangunan jalan, jembatan, fasilitas publik, dan infrastruktur lainnya yang penting sehingga mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan lebih memprioritaskan belanja operasi daripada belanja modal

5. Rasio Pertumbuhan

a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Tabel 10 Rasio Pertumbuhan Pendapatan

| Tahun | Total Realisasi Pendapatan (Pn) | Total Realisasi Pendapatan (Po) | % | Kriteria Pertumbuhan |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-------|----------------------|
| 2019 | Rp 1.008.114.675.739 | Rp 917.927.793.067 | 9,8% | Sangat Rendah |
| 2020 | Rp 939.495.651.454 | Rp 1.008.114.675.739 | -6,8% | Sangat Rendah |
| 2021 | Rp 980.263.296.077 | Rp 939.495.651.454 | 4,3% | Sangat Rendah |
| 2022 | Rp 942.550.853.382 | Rp 980.263.296.077 | -3,8% | Sangat Rendah |
| 2023 | Rp 1.009.951.652.096 | Rp 942.550.853.382 | 7,2% | Sangat Rendah |
| Rata-rata | | | 7,2% | Sangat Rendah |

Sumber: BPKPD Humbang Hasundutan (diolah)

Berdasarkan tabel 10 di atas pertumbuhan belanja mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 realisasi pendapatan meningkat Rp 1.008.114.675.739 dari realisasi pendapatan tahun sebelumnya Rp 917.927.793.067 dengan persentase 9,8%. Pada tahun 2020 pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan yaitu Rp 939.495.651.454 dengan persentase -6,8%, tahun 2021 pertumbuhan pendapatan mengalami peningkatan yaitu Rp 980.263.296.077 dengan persentase 4,3%, tahun 2022 pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan lagi yaitu Rp 942.550.853.382

dengan persentase -3,8% dan tahun 2023 pertumbuhan pendapatan mengalami peningkatan yaitu Rp 1.009.951.652.096 dengan persentase 7,2%. Maka rata-rata persentase dari lima tahun berturut-turut adalah 7,2%.

Hasil dari penelitian bahwa rata-rata dari Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2019-2023 adalah positif yaitu 7,2% dengan kategori sangat rendah. Pendapatan Asli Daerah masih kecil dibandingkan dengan bantuan dari pusat. Karena pertumbuhannya masih di bawah 10%, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan upaya lebih serius dalam menggali potensi pendapatan daerah secara maksimal, khususnya pada sektor-sektor yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Rasio Pertumbuhan Belanja

Tabel 11 Rasio Pertumbuhan Belanja

| Tahun | Total Realisasi Belanja (Pn) | Total Realisasi Belanja (Po) | % | Kriteria Pertumbuhan |
|-----------|------------------------------|------------------------------|-------|----------------------|
| 2019 | Rp 811.690.125.779 | Rp 758.721.345.616 | 7,0% | Sangat Rendah |
| 2020 | Rp 765.374.439.783 | Rp 811.690.125.779 | -5,7% | Sangat Rendah |
| 2021 | Rp 799.555.477.225 | Rp 765.374.439.783 | 4,5% | Sangat Rendah |
| 2022 | Rp 834.298.860.910 | Rp 799.555.477.225 | 4,3% | Sangat Rendah |
| 2023 | Rp 1.045.288.109.320 | Rp 834.298.860.910 | 25,3% | Sedang |
| Rata-rata | | | 2,1% | Sangat Rendah |

Sumber: BPKPD Humbang Hasundutan (diolah)

Pada tabel 11 di atas pertumbuhan belanja pada tahun 2019 Rp 811.690.125.779 meningkat dari tahun sebelumnya Rp 758.721.345.616 dengan persentase 7,0%, tahun 2020 pertumbuhan belanja mengalami penurunan yaitu Rp 765.374.439.783 dengan persentase -5,7%, tahun 2021 pertumbuhan belanja mengalami peningkatan yaitu Rp 799.555.477.225 dengan persentase 4,5%, tahun 2022 pertumbuhan belanja mengalami peningkatan Rp 834.298.860.910 dengan persentase 4,3% dan tahun 2023 pertumbuhan belanja mengalami peningkatan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yaitu Rp 1.045.288.109.320 dengan persentase 25,3% . Maka rata-rata persentase dari lima tahun berturut-turut adalah 2,1%. Hasil dari penelitian rata-rata dari Rasio Pertumbuhan Belanja Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2019-2023 adalah positif yaitu 2,1% dengan kategori sangat rendah. Hal ini menunjukkan Belanja Daerah didominasi oleh Belanja Operasi sehingga anggaran untuk Belanja Modal setiap tahunnya kecil bahkan Pemerintah lambat menyerap anggaran pertumbuhan serta kurangnya efisiensi dalam penggunaan anggaran dapat menjadi penyebab rendahnya realisasi belanja APBD

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang didapatkan peneliti mengenai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019-2023 adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu:

- berdasarkan rata rata persentase Rasio Kemandirian adalah 9,0% berada pada pola hubungan Instruktif. Pola hubungan Instruktif menggambarkan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah dimana daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. Sehingga hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan masih ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat/provinsi dikarenakan belum mampu secara mandiri dalam mengelola keuangan daerah dengan memanfaatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal.
- Berdasarkan Rasio Efektivitas adalah 100,1% dengan kategori Efektif. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dapat mengelola anggarannya dengan baik sehingga pendapatan daerah yang diperoleh hampir mencapai target, menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan cukup baik dimana pemerintah mampu memobilisasi sumber-sumber pendapatan.

3. Berdasarkan Rasio Efisiensi adalah 87% dengan kategori Cukup Efisien. Hal ini menunjukkan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tidak melebihi pendapatan tetapi pada tahun 2023 pada Laporan Realisasi Anggaran realisasi belanja daerah melebihi pendapatan karena belanja transfer digabung dengan belanja daerah karena tahun sebelumnya adanya akun transfer bantuan keuangan lainnya sehingga dipisah dengan belanja daerah. Walaupun demikian dalam 5 tahun terakhir efisiensi pengelolaan keuangan daerah Cukup Efisien.
4. Berdasarkan Rasio Keserasian/Aktivitas Belanja Operasi adalah 76,6% masih tergolong ideal yang menunjukkan masih tingginya alokasi Belanja Operasi daripada Belanja Modal. Faktor yang mempengaruhi belanja operasi antara lain, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Sedangkan rata-rata persentase Rasio Keserasian/Aktivitas Belanja Modal adalah 19,1% tergolong ideal tetapi masih perlunya meningkatkan proporsi belanja modal agar manfaat pembangunan bisa lebih berkelanjutan dan berdampak jangka panjang. Faktor yang mempengaruhi belanja modal yaitu, belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya.
5. Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Pendapatan adalah 0,2% dengan kategori Sangat. Persentase Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan masih sangat rendah karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum stabil sehingga pendapatan daerah tidak meningkat. Sedangkan rata-rata persentase Rasio Pertumbuhan Belanja adalah 5,7% dengan kategori Sangat Rendah hal ini menunjukkan pertumbuhan belanja belum optimal karena anggaran besar tetapi realisasi di lapangan Pemerintah daerah lambat menyerap anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini & Loekman, Z. (2024). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek. *Jurnal IAKP*, 5(1). 68-27.
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Santo Thomas 2022.
- Daling, M. (2013). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Emba*, 1(3), 82-89.
- Darise, Nurlan. 2008. Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jakarta: Mancanan Jaya Cemerlang.
- Dien.A.N.J., Tinangon.J., S. W. (2015). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal Emba*, 3(1), 534-541.
- Halim, A (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Ketiga Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta, 2002 hal.42
- HumbangHasundutankab.go.id - APBD & LKjIP.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690. 900-327 Tahun 1996 Tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, Jakarta.
- Majampoh, W. T., & Datu, C. (2021). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal Emba*, 9(2), 1731-1741.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. *Akuntansi Sektor Publik*, 1-87.
- Mursyidi. (2009). Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Bandung: RefikaAditama, hal:1.
- Naffa Litauji Milla. (2021). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Kantor Camat Kramat. *Skripsi*. Politeknik Harapan Bersama, 2021.
- Nordiawan. D & A Hertianti.A. (2006) Akuntansi Sektor Publik, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta Selatan, hal:158.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rukayah, N., & Kusumawati, R. I. A. (2017). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 1-11.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta, 326-329.



- Suryantini, N. P. S., Darmayanti, N. P. A., & Candraninggrat, I. R. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Prosiding Seminar Nasional AIMI*, 32, 27-28.
- Trismiko, D. (2016). Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada DPKAD Kabupaten Sleman Yogyakarta).
- Tulangow A.P., & Runtu.T. (2016). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Emba*, 4(3), 564-571.
- Ulum, I. (2024). *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Bumi Aksara.